

BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

2.1. Profil Kabupaten Serdang Bedagai

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIMED

Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten baru di wilayah propinsi Sumatera Utara. Sebelumnya kabupaten ini berada dalam wilayah kabupaten Deli Serdang. Namun belakangan wilayah ini berkembang dan berproses menjadi kabupaten yang berdiri sendiri di luar kabupaten Deli Serdang.

Adanya keinginan dan dorongan untuk dimekarkannya wilayah kabupaten Deli Serdang sebenarnya telah cukup lama muncul di kalangan masyarakat Deli Serdang. Tahun 1992 hal tersebut telah menjadi kajian tersendiri bagi pemerintahan Deli Serdang. Dasar pertimbangan untuk dilakukannya pemekaran adalah luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang begitu besar untuk sebuah kabupaten (BPS Kabupaten Deli Serdang, 2003: ix).

Kajian terhadap pemekaran wilayah pada masa itu telah sampai pada dikeluarkannya keputusan DPRD Kabupaten Deli Serdang Nomor 02/DPRD/1992 tanggal 27 Februari 1992 tentang persetujuan pemekaran wilayah kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, yang menetapkan bahwa kabupaten Deli Serdang dimekarkan menjadi dua wilayah, yaitu: kabupaten Deli dan kabupaten Serdang. Perencanaan pemekaran tersebut terhenti dan kembali berjalan pada saat reformasi bergulir tahun 1998.

Kelahiran Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan di daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, memberikan ruang yang semakin terbuka lebar bagi keinginan masyarakat untuk melakukan pemekaran.

Beberapa kelompok masyarakat yang terbentuk dalam upaya pemekaran kabupaten Deli Serdang adalah: (1) Badan Pendukung Pemekaran Kabupaten Deli Serdang (BPPKDS) tahun 1992, (2) Panitia Pembentukan Kabupaten Deli (PPKD) tahun 1992, (3) Panitia Pembentukan Pemekaran Kabupaten Serdang Bedagai (P3KSB) tahun 2002.

Adapun BPPKDS pada awalnya merencanakan kabupaten deli Serdang dibagi menjadi dua kabupaten sesuai dengan konsep pemekaran tahun 1992. Dengan usulan ibukota kabupaten pemekaran antara lain: Dolok Masihul, Sei Rampah dan Perbaungan. Sedangkan PPKD lebih menekankan pada pembentukan kabupaten baru yakni: kabupaten Deli dengan ibukota Patumbak. Sehingga tujuan adanya pemekaran wilayah tidak tampak. Tetapi lebih pada keinginan untuk memisahkan diri dari kabupaten Deli Serdang saja.

Keinginan yang begitu besar dari masyarakat disikapi dengan arif dan bijaksana oleh pemerintah kabupaten Deli Serdang dengan menyusun konsep dasar pemekaran kabupaten dan melakukan kajian-kajian dalam rangka pemekaran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan masukan dari berbagai elemen masyarakat, pemerintah kabupaten Deli Serdang mengusulkan kabupaten Deli Serdang

dimekarkan menjadi tiga (3) yaitu: kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten induk, kabupaten Deli dan kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran. (BPS Kabupaten Deli Serdang, 2003: ix).

Perjalanan panjang proses pemekaran kabupaten Deli Serdang secara hukum dimulai dari ditetapkannya keputusan DPRD kabupaten Deli Serdang Nomor 13/KP/Tahun 2002 tanggal 2 Agustus 2002 tentang persetujuan pembentukan/pemekaran kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya, DPRD propinsi Sumatera Utara melalui keputusan nomor 18/K/2002 tanggal 21 Agustus 2002 menetapkan persetujuan pemekaran kabupaten Deli Serdang.

DPRD kabupaten Deli Serdang melalui keputusan nomor 26/K/DPRD/2003 tanggal 10 Maret 2003 menetapkan persetujuan usul rencana pemekaran kabupaten Deli Serdang menjadi dua (2) kabupaten, yaitu: kabupaten Deli Sedang sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Serdang Bedagai sebagai kabupaten pemekaran dengan ibukota Sei Rampah.

Nama Serdang Bedagai ditetapkan berdasarkan pada sejarah awal wilayah ini. Di mana wilayah ini pada awalnya dalam lintasan sejarah yang panjang berada dalam wilayah Kesultanan Serdang dan Kesultanan Bedagai. Sehingga digabungkan nama dari dua kesultanan tersebut Serdang dan Bedagai, menjadi Serdang Bedagai. (BPS Kabupaten Deli Serdang, 2003: ix).

Menindaklanjuti hasil-hasil keputusan yang telah ada sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara melalui surat nomor 136/6777 tanggal 30 Agustus 2002 meneruskan usul pemekaran kabupaten Deli Serdang beresama-sama dengan Nias dan Toba

Samosir, kepada Menteri Dalam Negeri. Hasilnya, pada tanggal 6 Januari 2004 Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan nomor 131.21-26 tahun 2004 tentang pengangkatan pejabat Bupati Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara. Dengan demikian, secara resmi terbentuk kabupaten Serdang Bedagai.

2.2 Kondisi Wilayah dan Keadaan Masyarakat

Kabupaten Serdang Bedagai ini terletak pada posisi $2^{\circ} 57''$ Lintang Utara, $3^{\circ} 16''$ Lintang Selatan, $98^{\circ} 33''$ Bujur Timur, $99^{\circ} 27''$ Bujur Barat. Dengan ketinggian berkisar 0-500 meter dari permukaan laut. Setelah mengalami pemekaran dan berdiri sendiri luas wilayah Serdang Bedagai adalah 1.900,22 Km². Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: sebelah Utara dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan kabupaten Simalungun, sebelah Timur dengan kabupaten Asahan dan Simalungun, dan sebelah Barat dengan kabupaten Deli Serdang (Lampiran gambar. 1).

Seperti umumnya wilayah kabupaten di Sumatera Utara, Serdang Bedagai beriklim tropis. Rata-rata kelembaban udara perbulan sekitar 84 %. Curah hujan berkisar antara 30 sampai dengan 340 mm per bulan, di mana periodik tertinggi pada bulan Agustus sampai dengan September. Rata-rata kecepatan udara berkisar 1,10 m/dt dengan tingkat penguapan sekitar 3,74 mm per hari. Temperatur udara per bulan minimum $23,7^{\circ} \text{C}$ dan maksimum $32,2^{\circ} \text{C}$.

Kabupaten Serdang Bedagai terbagi ke dalam 11 wilayah kecamatan dengan 238 buah desa dan 5 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten ini. Penduduknya sangat majemuk baik dari segi etnis maupun latar belakang agamanya.

Dengan catatan Islam dan Kristen merupakan dua agama terbesar yang dianut oleh masyarakatnya.

Di antara etnis terbesar dari sekian banyak etnis yang menempati wilayah ini adalah: Jawa, Melayu, Batak, Karo, Simalungun. Dipandang dari segi latar belakang etnis, umumnya yang masuk ke sektor perburuhan atau yang bekerja menjadi buruh kebun di Serdang Bedagai adalah etnis Jawa dan Batak.

Bisa dipastikan bahwa etnis Jawa merupakan etnis terbesar yang hampir dijumpai bekerja menjadi buruh perkebunan di Serdang Bedagai. Meskipun tidak ditemukan data tertulis untuk hal ini. Tetapi ini bisa diduga berdasarkan hasil observasi umum selama di lapangan. Hal ini dimungkinkan karena secara umum etnis ini dikenal sebagai orang-orang yang rajin dan pekerja keras.

Adapun etnis-etnis lain seperti etnis Batak dan lainnya tidaklah sebanyak etnis Jawa di perkebunan. Biasanya etnis Batak ini menjadi mandor atau petugas keamanan dan sejenisnya di perkebunan. Tetapi tidak tertutup kemungkinan ada juga yang bekerja sebagai buruh biasa.

Sedangkan etnis Melayu, meskipun ada yang bekerja di sektor perburuhan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar. Sebab umumnya mereka bekerja di sektor ke lautan menjadi nelayan dan sebagainya.

Hingga tahun 2003 jumlah penduduk Serdang Bedagai berjumlah 585.665 jiwa dan terdiri dari 135.122 rumah tangga. Dari total jumlah penduduk tersebut komposisi penduduk laki-laki berjumlah 294.710 jiwa dan 290.955 jiwa perempuan.

Kecamatan dan jumlah penduduk pada setiap kecamatan yang ada di Serdang Bedagai dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai

| | | | |
|----|------------------|------------------|---------------|
| 1 | Kotarih | Kotarih | 27144 |
| 2 | Dolok Masihul | Dolok Masihul | 75995 |
| 3 | Sipispis | Sipispis | 38301 |
| 4 | Dolok Merawan | Dolok Merawan | 17495 |
| 5 | Tebing Tinggi | Tebing Tinggi | 76764 |
| 6 | Bandar Khalipah | Bandar Khalipah | 25681 |
| 7 | Tanjung Beringin | Tanjung Beringin | 35658 |
| 8 | Teluk Mengkudu | Sialang Buah | 40487 |
| 9 | Sei Rampah | Sei Rampah | 106369 |
| 10 | Perbaungan | Perbaungan | 116634 |
| 11 | Pantai Cermin | Pantai Cermin | 38314 |
| | Total | | 585665 |

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang 2003: 18

Tingkat kepadatan penduduk Serdang Bedagai pada tahun 2003 mencapai 308 jiwa/Km². Kepadatan penduduk terbesar adalah di kecamatan Perbaungan yaitu sebesar 538 jiwa/Km² atau 114.068 jiwa atau 19,47 % dari total jumlah penduduk Serdang Bedagai. Selanjutnya, kecamatan Tanjung Beringin 537 jiwa/Km², Teluk Mengkudu 496 jiwa/Km². Adapun kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Kotarih 126 jiwa/Km² dan kecamatan Sipispis 168 jiwa/Km².

Dari sekitar 585.665 jiwa penduduk Serdang Bedagai yang berusia 10 tahun ke atas atau penduduk usia kerja sebanyak 276.650 jiwa merupakan angkatan kerja. Mereka adalah yang berstatus bekerja sebesar 261.876 dan berstatus menganggur sebesar 14.774 jiwa. Ditinjau menurut lapangan usaha penduduk yang bekerja, lebih

dari 105.477 orang penduduk kabupaten Serdang Bedagai yang bekerja di sektor pertanian termasuk di dalamnya sektor perkebunan. Sektor perdagangan menyerap pekerja sebanyak 42.079 orang, sektor industri 41.506 orang dan sektor jasa mencapai 39.736 orang. Secara rinci jenis pekerjaan penduduk Serdang Bedagai :

Tabel 2
Jenis Lapangan Pekerjaan Di Kabupaten Serdang Bedagai

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Pertanian/Perkebunan | 61565 | 43912 | 105477 |
| 2 | Pertambangan | 519 | Tidak terdata | 519 |
| 3 | Industri pengolahan | 22232 | 19274 | 41506 |
| 4 | Listrik, Gas, Air minum | 831 | 281 | 1112 |
| 5 | Bangunan | 16426 | 411 | 16837 |
| 6 | Perdagangan besar, eceran, rumah makan, hotel | 18041 | 24038 | 42079 |
| 7 | Pengangkutan dan Komunikasi | 14934 | 259 | 15192 |
| 8 | Keuangan, Asuransi, Persewaan bangunan, tanah, jasa perusahaan | 530 | 162 | 691 |
| 9 | Jasa kemasyarakatan | 22736 | 17000 | 39736 |
| 10 | Lainnya | 1918 | 2700 | 4619 |
| | Total | 159732 | 108036 | 267768 |

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang 2003: 27

Dengan demikian, dipahami bahwa sektor pertanian dan perkebunan merupakan lapangan kerja yang paling banyak ditekuni oleh penduduk di Serdang Bedagai. Hal ini dikarenakan, luasnya penggunaan areal pertanian yang digunakan untuk sektor pertanian dan perkebunan tersebut.

Kondisi ini bisa dilihat bahwa di sepanjang jalan lintas Sumatera yang melalui wilayah Serdang Bedagai ditemukan lahan pertanian dan perkebunan baik milik rakyat, PTPN dan swasta lainnya.

Jenis pekerjaan tersebut masih dapat dirinci lebih jelas berdasarkan status pekerjaannya. Secara rinci status pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Status Pekerjaan Utama Penduduk Kabupaten Serdang Bedagai

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain | 24359 | 19090 | 43449 |
| 2 | Bekerja dengan bantuan anggota keluarga/buruh tidak tetap | 27746 | 20257 | 48002 |
| 3 | Bekerja dengan status buruh tetap | 3066 | 1027 | 4093 |
| 4 | Buruh/Karyawan pemerintah dan buruh/karyawan swasta | 89738 | 43571 | 133308 |
| 5 | Pekerja keluarga | 14823 | 24092 | 38915 |
| | Total | 159732 | 108036 | 267768 |

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang 2003: 29

Dari data di atas, ada temuan yang menarik bahwa status pekerjaan utama penduduk di Serdang Bedagai sebagai buruh, baik tetap maupun tidak tetap cukup besar jumlahnya. Meskipun tidak ditemukan data secara spesifik pada sektor apa mereka bekerja sebagai buruh.

Yang pasti dalam hal ini bekerja sebagai buruh pada sektor perkebunan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Selain luasnya wilayah perkebunan di Serdang Bedagai juga jenis pekerjaan di perkebunan tidak memerlukan persyaratan yang terlalu sulit. Tenaga merupakan modal utama masuk ke sektor perkebunan.

2.3 Sejarah dan Kondisi Umum Perkebunan di Serdang Bedagai

Sejarah perkebunan di Sumatera Utara atau Sumatera Timur dimulai pada abad ke 17. Ketika Belanda melakukan pembukaan hutan secara besar-besaran untuk

dijadikan areal perkebunan. Perkebunan-perkebunan di Sumatera Utara dulunya kebanyakan milik swasta asing yang sejak pendudukan Jepang ditinggalkan oleh pemiliknya telah dieksploitir Jepang.

Seperti diketahui pemerintah Belanda pada mulanya menjadikan bekas keresidenan Sumatera Timur menjadi daerah perkebunan (*cultuur gebied*). Hal ini dimungkinkan karena keadaan tanah serta letaknya memenuhi syarat-syarat untuk perkebunan-perkebunan besar. Selain itu, penduduknya relatif masih sedikit. Usaha tersebut dapat berjalan juga dikarenakan oleh: (1) adanya pemerintah pemerintah yang mempunyai alat-alat kekuasaan yang tidak boleh dibantah, (2) adanya kerjasama antara pemerintah kolonial dengan kepala-kepala Swapraja, (3) adanya sebagian pendapatan Swapraja yang bersumber dari perkebunan-perkebunan besar ini (Almanak Sumatera Utara, 1969: 453).

Tanah-tanah perkebunan besar ini diperoleh dari hasil perjanjian antara pengusaha-pengusaha swasta asing (umumnya Belanda) dengan kepala-kepala Swapraja yang mendapat legalisasi dari Residen Sumatera Timur yang kemudian menjadi tanah-tanah konsesi perkebunan dalam jangka waktu lama. Hampir seluruh tanah-tanah yang baik dibekas Keresidenan Sumatera Timur ini menjadi perkebunan, baik karena kualitas tanahnya maupun karena letaknya yang dihubungkan dengan jalan-jalan perhubungan dan kereta api. Sehingga tanah-tanah yang tinggal bagi penduduk pada umumnya adalah tanah rawa-rawa atau tanah kering berbukit-bukit yang terpencil dari jalan-jalan perhubungan.

Ada juga perkampungan penduduk bahkan juga kota-kota kecil yang terletak di dalam perkebunan. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan kampung dan kota semacam ini menjadi terhalang. Guna memenuhi perkembangan kampung serta memenuhi kebutuhan penduduk kampung akan tanah pertanian dan perkampungan serta keperluan-keperluan lainnya, maka di dalam akte konsesi ada klausule yang mengatakan bahwa setiap lima tahun harus ada peninjauan terhadap perluasan kampung. Termasuk tanah wakaf, tanah pertanian dan lain-lain. Selain itu, penduduk dengan persetujuan pengusaha diperkenankan membuka jalan dan tali air melalui tanah-tanah perkebunan sesuai dengan kebutuhan penduduk.

Akan tetapi pengusaha-pengusaha asing ini tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam akte konsesinya. Karena dianggap pembukaan jalan akan mengakibatkan pencurian, pembukaan tali air akan menimbulkan kerusakan-kerusakan tanah dan tanaman.

Pada masa pendudukan Jepang perkebunan-perkebunan diterlantarkan atau tidak diolah sebagaimana mestinya. Buruh perkebunan kehilangan pekerjaan tanpa ada jaminan dari bekas majikan yang telah melarikan diri atau ditawan Jepang. Pengusaha Jepang di kala itu memerintahkan buruh perkebunan dan rakyat sekitarnya untuk mengusahakan atau menggarap tanah-tanah perkebunan itu buat menghasilkan bahan pangan, baik untuk keperluan sendiri maupun kepentingan penguasa Jepang. Lambat laun tanah-tanah garapan ini bertambah luas dan di sana-sini terjadilah kompleks-kompleks pertanian rakyat lengkap dengan perkampungan-

perkampungannya. ada yang dibagian pinggir dan ada yang di dalam areal perkebunan.

Pada masa perjuangan kemerdekaan, perkebunan-perkebunan ini diurus oleh pemerintah Indonesia dan diolah seberapa mungkin dengan tenaga-tenaga rakyat penggarap. Tanah-tanah garapan ini tidak diganggu gugat malah makin meluas dan diintensipkan pengolahannya untuk bahan pangan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Sejak kemerdekaan Indonesia perkebunan-perkebunan itu dilanjutkan oleh pemerintah Indonesia. Pengembalian kepada pemilik-pemiliknya semula barulah berlaku sejak tahun 1947 di daerah-daerah yang diduduki Belanda.

Dalam perjuangan Republik Indonesia untuk menegakkan kembali negara kesatuan, tidak sedikit jumlah rakyat dan pejuang yang diperintahkan oleh penguasa republik serta sukarelawan menyusup ke perkebunan-perkebunan dan tanah-tanah garapan tersebut sebagai infiltran menghancurkan dari dalam negara bagian yang didalangi oleh Belanda dan mendorong kembali pada bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Setelah tegaknya kembali negara kesatuan, rakyat penggarap walaupun tidak dalam jumlah besar terus mengalir dari daerah-daerah pedalaman dan terpencil ke daerah-daerah perkebunan. Baik karena keadaan sosial ekonomi di tempatnya semula maupun karena gangguan keamanan.

Pengusaha perkebunan swasta asing yang pada umumnya terdiri dari bekas NICA dan KNIL mengajukan tuntutan-tuntutan dan mengadakan tindakan di sana-sini untuk mengosongkan kembali tanah-tanah garapan rakyat. Hingga terjadilah

pentraktoran tanah garapan serta pengusiran rakyat penggarap. Sebagai reaksi dari tindakan tersebut rakyat mengadakan perlawanan dengan melakukan penggarapan baru secara beramai-ramai sampai melakukan penebangan-penebangan pohon-pohon tanaman yang ada.

Kalau rakyat tadinya melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda, maka kini perlawanan diarahkan kepada pengusaha-pengusaha perkebunan asing. Apalagi di masa memuncaknya perjuangan Trikora, hingga rakyat di satu pihak mengadakan tantangan dan perlawanan bukan hanya karena faktor sosial ekonomi semata, tetapi sudah dibarengi dengan dengan faktor politis buat menangkis antek-antek kolonialisme pengusaha-pengusaha Belanda.

Setelah perkebunan-perkebunan Belanda diambil alih oleh pemerintah situasinya tidak banyak berubah. Adapun penggarapan-penggarapan masih terus berlangsung meskipun tidak secara besar-besaran. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: (1) keruwetan-keruwetan serta rasa ketidakpuasan yang ditinggalkan pengusaha-pengusaha swasta Belanda, (2) gangguan-gangguan keamanan di pedalaman akibat pemberontakan PRRI, (3) meningkatnya kebutuhan rakyat akan tanah pertanian yang baik serta untuk perluasan-perluasan perkampungan dan kota yang pertumbuhan penduduknya sangat pesat seperti Pematang Siantar, Serbelawan, Perdagangan, Kisaran, Rantau Prapat, Tebing Tinggi dan lainnya yang letaknya diapit oleh areal perkebunan, (4) tanah-tanah garapan lama yang sudah menjadi kurang subur dan gersang disebabkan usaha-usaha rakyat untuk mengairinya selalu mendapat rintangan dari pengusaha asing, (5) keadaan yang sudah demikian rumitnya ini bertambah lagi

disebabkan adanya unsur-unsur politik yang berdiri di belakang layar mengarahkan pengikutnya melakukan penggarapan-penggarapan liar. Hal ini tampak jelas pada saat menjelang meletusnya peristiwa Gestapu/PKI (Almanak Sumatera Utara, 1969: 454-455).

Karena itu, perkebunan di Sumatera Utara secara umum merupakan warisan dari pemerintahan kolonial Belanda sejak tahun 1863. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 seperti telah dijelaskan di atas secara bertahap perkebunan di Sumatera Utara beralih kepada pemerintah Indonesia. Khususnya ketika terbit undang-undang No. 86 tahun 1958 tentang nasionalisasi perusahaan perkebunan milik Belanda.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia langsung menguasai dan mengelola perkebunan milik Belanda melalui pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara (PNP) yang dikenal dengan PTPN sekarang. Pada perkembangan selanjutnya, negara melakukan reposisi kepemilikan, pengelolaan serta pengembangan dengan memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada para investor dan swasta lainnya untuk berinvestasi di sektor perkebunan.

Di Sumatera Utara, sejarah perkembangan perkebunan tersebut terkait erat dengan sejarah masuknya manusia secara besar-besaran untuk memenuhi keperluan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pemilik perkebunan.

Sejarah panjang perekrutan buruh tersebut memiliki catatan dan menyimpan banyak persoalan-persoalan besar. Menurut Harris (2002:1) bahwa secara historis mulai dari perjalanan hingga perkembangannya, perkebunan di Sumatera Utara

menyimpan permasalahan besar yaitu terjadinya eksploitasi manusia yang bekerja menjadi buruh perkebunan. Mulai sejarah berdirinya perkebunan hingga sekarang pola penindasan, eksploitasi dan pemaajinalan terus dibentuk berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Dahulu pola eksploitasi lebih menonjolkan pada bentuk kekerasan fisik, tetapi sekarang diciptakan melalui sistem yang dibentuk melalui kebijakan-kebijakan yang lebih halus.

Misman (65 tahun) dan Sunardi (53 tahun) sebagai aktifis buruh perkebunan di Serdang Bedagai yang lama bekerja memberdayakan organisasi buruh perkebunan menggambarkan kondisi di perkebunan sebagai berikut:

Perkebunan di Sumatera Utara merupakan perkebunan warisan dari *onderneming* kolonialis Belanda yang sangat kapitalistik dan feodalistik. Buruh-buruhnya diperlakukan sebagai budak dan sebagai alat untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya. Lokasi-lokasi perkebunan dikondisikan pada areal-areal yang terisolir yang saling berjauhan satu sama lain. Lokasi-lokasi ini di perkebunan disebut *afdeling-afdeling* atau *devison-devison*. Lingkungan kehidupannya hanyalah lingkungan sesama buruh di satu *afdeling* itu sendiri, sehingga tertutup dari dunia lain. Kondisi perkebunan yang semacam itu telah terjadi di abad kolonial dengan sejarahnya dulu dengan sebutan kuli kontrak. Keadaan kuli kontrak yang seperti itu hingga kini masih mewarnai kehidupan buruh perkebunan yang katanya sudah hidup di zaman modern.

Sampai saat ini pun kebutuhan perkebunan akan buruh masih terus berjalan, seiring dengan berkembangnya sejumlah perusahaan perkebunan di Serdang Bedagai. Baik yang berskala besar, menengah, maupun perusahaan perkebunan dengan skala dan kapasitas kebutuhan manusia yang relatif kecil.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan saat ini ada dua belas perusahaan perkebunan besar di Serdang Bedagai. Dengan luas areal perkebunan antara 1000 Ha

hingga 2000 Ha dan kebutuhan tenaga buruh di atas 50 orang. Tiga di antara perusahaan perkebunan tersebut adalah milik negara (PTPN), dua perusahaan perkebunan daerah (PD) dan tujuh buah lagi merupakan perusahaan perkebunan swasta. Untuk lebih jelas daftar kedua belas perusahaan perkebunan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Daftar Perusahaan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai

| No | Perusahaan Perkebunan | Jenis Tanaman | Status Pemilikan |
|----|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | PTPN II | Sawit, Coklat | BUMN |
| 2 | PTPN III | Sawit, Coklat | BUMN |
| 3 | PTPN IV | Sawit, Coklat | BUMN |
| 4 | PT. PABUCO | Karet, Coklat | Swasta |
| 5 | PT. INDAH PONCAN | Karet, Sawit, Coklat | Swasta |
| 6 | PT. SULONG LAUT | Karet, Sawit, Coklat | Swasta |
| 7 | PT. MANDARIS A | Karet, Sawit | Swasta |
| 8 | PT. SOCFINDO | Karet, Sawit, Coklat | Swasta |
| 9 | PT. LONSUM | Karet, Sawit, Coklat | Swasta |
| 10 | PT. MUIS | Karet, Sawit, Coklat | Swasta |
| 11 | PD. PAYAH PINANG | Karet, Sawit, Coklat | Perusahaan Daerah |
| 12 | PD. TANJUNG KASAU | Karet, Sawit, Coklat | Perusahaan Daerah |

Sumber: Hasil Wawancara

Selain yang telah disebutkan di atas, masih terdapat banyak perusahaan perkebunan di Serdang Bedagai yang berskala kecil. Yaitu perusahaan perkebunan yang memiliki areal perkebunan kurang dari 1000 Ha dengan jumlah tenaga kerja di bawah 50 orang. Umumnya perusahaan perkebunan skala kecil tersebut adalah milik swasta per orang.

Data luas tanaman perkebunan milik PTPN II, III dan IV di Serdang Bedagai hingga 2003 sebagai berikut:

Tabel 5
Luas Perkebunan PTPN II, III dan IV Menurut Jenis Tanaman (Ha)

| | | | | |
|---|----------------------------|----------|----------|----------|
| 1 | Tanaman belum menghasilkan | | | |
| | - Karet | 866,06 | 866,05 | 866,05 |
| | - Kelapa sawit | 2603,45 | 2603,45 | 2603,45 |
| | - Coklat | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| | - Tembakau | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| | - Tebu | 87,50 | 87,50 | 87,50 |
| 2 | Tanaman menghasilkan | | | |
| | - Karet | 4722,31 | 4722,31 | 4722,31 |
| | - Kelapa sawit | 8232,11 | 8232,11 | 8232,11 |
| | - Coklat | 4659,72 | 4659,72 | 4659,72 |
| | - The | 933,21 | 933,21 | 933,21 |
| | - Tembakau | 4088,93 | 4088,93 | 4088,93 |
| | - Tebu | | | |
| 3 | Luas tanam | | | |
| | - Karet | 5595,14 | 5595,14 | 5595,14 |
| | - Kelapa sawit | 11043,02 | 11043,02 | 11043,02 |
| | - Coklat | 4709,30 | 4709,30 | 4709,30 |
| | - Tembakau | 943,21 | 943,21 | 943,21 |
| | - Tebu | 4251,43 | 4251,43 | 4251,43 |

Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang 2003: 121

2.4 Kehidupan Buruh di Perkebunan

Secara umum buruh di perkebunan tinggal di perumahan-perumahan yang disediakan oleh perusahaan perkebunan, terutama buruh tetap. Biasanya perumahan-perumahan tersebut terletak dekat dengan lokasi perkebunan atau tempat bekerja buruh. Sehingga letaknya terpencil atau jauh dari jalan umum dan keramaian.

Untuk sampai ke lokasi perumahan buruh biasanya pun harus menggunakan alat transportasi yang memadai seperti mobil atau sepeda motor. Tetapi tidak sedikit

di antara buruh yang hanya menggunakan sepeda sebagai alat transportasi keluar dan masuk afdeling.

Di samping buruh, untuk para karyawan dan orang-orang penting di perkebunan juga disediakan perumahan. Tetapi fasilitas dan lokasi perumahan untuk mereka berbeda dan dipisahkan dari buruh biasa. Perumahan mereka biasanya terletak dekat dengan jalan besar atau umum yang biasa dilalui orang atau dekat dengan tempat atau fasilitas milik perkebunan. Sehingga relatif lebih ramai.

Bentuk bangunan tempat tinggal untuk orang perusahaan ini pun jauh lebih besar dan megah jika dibandingkan untuk buruh. Tentunya dengan fasilitas pendukung yang lengkap pula seperti mobil, petugas kebersihan dan penjaga keamanan. Masuk ke lokasi perumahan mereka pun tidak bebas. Karena ada petugas penjaga keamanan yang menjaga tempat tinggal mereka.

Perumahan buruh tersebut dikelilingi tanaman kelapa sawit atau karet. Seperti afdeling satu kebun PTPN 4 Adolina misalnya, terletak kira-kira 10 kilo meter dari jalan lintas Kecamatan Perbaungan dengan jalan beraspal kasar. Sedangkan afdeling ini merupakan afdeling yang terdekat dengan kota Perbaungan. Dapat dibayangkan letak afdeling-afdeling lainnya yang jauh dari Perbaungan.

Lokasi tempat tinggal yang demikian dibangun perusahaan dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi waktu bekerja buruh. Sebab buruh tidak perlu setiap harinya menggunakan waktu terlalu lama untuk menuju lokasi perkebunan tempat mereka bekerja atau disebut *ancak*. Kembali ke perumahan pun dekat.

Jadi lokasi tempat tinggal buruh pun diatur sedemikian rupa agar konsentrasi bekerja lebih diutamakan. Selain itu, dari sudut transportasi buruh juga mudah di pindahkan dari satu lokasi bekerja ke lokasi lainnya.

Dengan lokasi perumahan sedemikian rupa, maka mobilitas buruh ke luar perkebunan menjadi lebih sedikit. Sesekali saja mereka bepergian atau keluar dari afdeling. Itu pun untuk keperluan atau urusan yang memang sangat penting. Seperti berbelanja untuk keperluan sehari-hari, berobat atau berkunjung ke tempat sanak saudara atau teman jika ada undangan pesta. Tetapi itu pun frekuensinya juga sangat terbatas. Sehingga memang waktu mereka sehari-hari lebih banyak di afdeling perkebunan.

Bentuk dan ukuran bangunan perumahan buruh sangat sederhana. Hanya ada dua buah kamar tidur dengan ukuran kecil, ruang tamu, dan dapur. Bangunan perumahan buruh dibangun permanen. Namun ada juga yang semi permanen. Bahkan masih ada perumahan buruh yang menggunakan papan atau kayu. Model bangunan hingga warna tembok rumah buruh sama. Perumahan di susun berbaris mengarah dan mengikuti jalan utama masuk ke lokasi perumahan.

Lokasi-lokasi tempat tinggal buruh tersebut disebut afdeling. Dalam sebuah perusahaan perkebunan terdapat banyak afdeling. Afdeling ini prinsipnya mirip dengan desa. Tepatnya desa-desa yang ditempati oleh buruh perkebunan sebagai warganya dan berada di wilayah perkebunan. Di dalam satu afdeling ada sekitar 150 sampai dengan 200 kepala keluarga.

Tetapi, jumlah tersebut masih bervariasi antara satu afdeling dengan afdeling lainnya. Di afdeling satu perkebunan Adolina misalnya, hanya ada 100 kepala keluarga.

Pada sebuah afdeling ada juga kepala desa sebagai wakil pemerintah. Dahulu kepala desa di afdeling diangkat oleh pejabat pemerintahan, tidak dipilih oleh warga yang tinggal di afdeling. Karena itu posisi kepala desa hanya sebagai simbol saja yang bertugas untuk menjalankan birokrasi dan urusan warga yang berkaitan dengan masalah pemerintahan.

Dalam praktiknya, orang-orang dan pihak perusahaan perkebunanlah yang memiliki pengaruh dan wewenang sepenuhnya terhadap sebuah desa afdeling. Hal ini bisa diduga dikarenakan mulai dari fasilitas jalan, listrik, air minum, sekolah, rumah ibadah dan perumahan yang ada di afdeling perkebunan disediakan oleh perkebunan. Bisa dikatakan afdeling adalah desa milik perkebunan. Bahkan dinamika sosial dan budaya warga di dalamnya banyak dipengaruhi oleh perusahaan perkebunan.

Tetapi tidak semua buruh kebun mendapatkan fasilitas perumahan dari perkebunan. Hanya buruh tetap yang mendapat perumahan. Adapun buruh tidak tetap tinggal di desa-desa atau perkampungan-perkampungan yang berdekatan dengan perkebunan. Hal ini ada kaitannya dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi waktu bekerja buruh.

Kalaupun ada buruh tidak tetap yang mendapatkan jatah perumahan atau menempati perumahan di afdeling biasanya harus mendapat persetujuan perusahaan terlebih dahulu. Akan tetapi biasanya persetujuan tersebut memiliki syarat-syarat

tertentu. Misalnya, suami si buruh juga merupakan buruh perkebunan, ketika si suami meninggal keluarganya masih diperbolehkan tinggal di perumahan. Atau si buruh sudah pensiun tetapi masih tinggal di afdeling dengan cara membayar. Ada juga buruh perempuan yang tinggal di perumahan perkebunan dengan cara membayar atau melakukan pendekatan dengan pihak perkebunan.

Fasilitas perumahan yang diberikan kepada buruh tersebut bersifat sementara. Artinya selama buruh bekerja di perusahaan dia mendapatkan fasilitas perumahan. Jatah perumahan tersebut berakhir ketika buruh pensiun.

Bagi buruh tetap ketika pensiun diberikan uang pesangon, semacam uang pengganti untuk mendapatkan perumahan dari perkebunan. Tetapi jumlahnya tidak sebesar yang diharapkan oleh buruh untuk mendapatkan ganti perumahan di luar wilayah perkebunan.

Selain buruh, di afdeling juga ada orang perusahaan perkebunan yang tinggal, seperti mandor, kerani, asisten kebun. Namun fasilitas perumahan dan fasilitas pendukung mereka lebih baik dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan kepada buruh biasa.

Dengan menempatkan orang perusahaan di afdeling diharapkan perusahaan bisa memantau setiap proses dan dinamika sosial yang berlangsung. Sebab itulah seperti telah dinyatakan sebelumnya, meskipun di afdeling ada kepala desa tetapi biasanya pengaruh orang perusahaan di afdeling masih kentara. Sebab, secara sosial buruh berada di bawah mandor atau kerani dan asisten perkebunan secara langsung.

Makanya buruh akan lebih mengenal, lebih hormat dan patuh kepada mereka ketimbang kepada orang lain yang ada di afdeling.

Terkadang buruh pun dengan sukarela membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu di rumah asisten atau mandor. Hal itu merupakan sikap loyalitas dan kepatuhan buruh terhadap atasannya. Meskipun hal itu bukan merupakan pekerjaan buruh. Bahkan bisa membantu atasan dianggap buruh sebagai sebuah prestasi dan kesempatan untuk pengabdian diri. Jarang atau hampir tidak ada buruh yang menolak kesempatan tersebut.

Di samping perumahan buruh masih ada fasilitas lainnya yang dibangun perkebunan, seperti tempat pertemuan umum dan rumah ibadah. Bahkan di mesjid-mesjid yang terdapat di afdeling ada seorang petugas agama diangkat oleh perkebunan.

Di perkebunan petugas agama itu disebut *mudin kebun*. *Mudin* agama mendapat gaji dan fasilitas perumahan dari perkebunan. Statusnya sama dengan buruh tetap di perusahaan. Tugas pokoknya adalah menjalankan urusan-urusan yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan di afdeling.

Anak-anak buruh terkadang belajar agama di mesjid. Pada hari-hari besar perayaan keagamaan dilakukan pula di mesjid afdeling. Tetapi, dapat dikatakan bahwa frekuensi dan aktifitas keagamaan di afdeling sangat terbatas. Sebab konsentrasi warganya adalah bekerja. Apalagi setelah lelah bekerja maka waktu mereka lebih banyak digunakan untuk istirahat.

Seharusnya perkebunan juga harus menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak buruh. Tetapi dari hasil pengamatan jarang sekali perusahaan perkebunan yang menyediakan sekolah dan fasilitas pendidikan di afdeling-afdeling perkebunan. Karena itu burulah yang harus mencari sarana fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya.

Anak-anak buruh jika hendak bersekolah maka harus ke luar dari afdeling perkebunan. Dengan konsekuensi transportasi dan biaya pendidikan di tanggung sendiri oleh buruh. Demikian beberapa fasilitas yang mendukung kehidupan buruh di perkebunan.

Kehidupan sosial buruh perkebunan tidak jauh berbeda dengan kondisi di desa-desa luar perkebunan. Mereka tinggal dengan anggota keluarganya, berinteraksi dan bergaul dengan sesama buruh. Tetapi, aktifitas mereka lebih banyak dipergunakan untuk bekerja. Karena jumlah buruh di afdeling tidak terlalu banyak seperti disebutkan sebelumnya, mereka melakukan interaksi sosial langsung dan saling kenal satu dengan lainnya. Bahkan dengan anggota keluarga buruh mereka saling kenal. Situasi sosial mereka di afdeling sangat akrab. Jarang sekali muncul konflik di antara sesama buruh.

Buruh juga berinteraksi dengan warga di luar afdeling. Pada waktu libur atau ada pesta-pesta, seperti pesta perkawinan, sunatan dan lainnya mereka saling kunjung. Apalagi ketika hari-hari besar keagamaan dan perayaan hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri suasana di afdeling perkebunan terlihat semarak. Situasi sosialnya secara umum sama halnya dengan desa-desa lainnya di luar perkebunan.

Perbedaannya di afdeling perkebunan mereka yang berinteraksi tersebut relatif sama latar belakang, kondisi dan status sosialnya, yaitu sama-sama buruh perkebunan. Sehingga model dan pola interaksi di dalamnya tidak terlalu banyak variasi dan belum begitu rumit. Tetapi ada pola interaksi yang bertingkat antara buruh dengan orang-orang perusahaan perkebunan. Di mana orientasi interaksi bersifat satu arah dan bersifat patron klien.

Meskipun secara umum kita hanya mengenal buruh dan orang-orang perusahaan di perkebunan, tetapi buruh di perkebunan pun masih memiliki stratifikasi dan klasifikasi tersendiri. Artinya status sebagai buruh juga masih terdapat perbedaan yaitu antara buruh tetap dan buruh tidak tetap. Di samping kelompok karyawan perusahaan lainnya yang memiliki akses kuat terhadap perusahaan dan berstatus tetap seperti asisten, ADM, kerani, mandor, hansip, dan lainnya.

Berdasarkan hasil observasi peneliti selama di lapangan pada perkebunan PTPN 4 Serdang Bedagai secara umum kita bisa membagi buruh pada tiga jenis, yaitu: (1) Buruh tetap atau karyawan SKU, (2) Buruh harian lepas atau BHL, dan (3) Buruh anemer atau kontrak.

Pada komunitas buruh perkebunan, buruh/karyawan tetap atau SKU dipandang sebagai kelompok masyarakat yang memiliki kelas sosial tertinggi dibandingkan dengan dua jenis kelompok buruh lainnya.

Selain gaji pokok, buruh tetap mendapatkan fasilitas tempat tinggal, mendapat catu beras setiap bulannya, serta disediakan pelayanan kesehatan dari perusahaan.

Meskipun fasilitas tersebut sering sekali sangat sederhana dan masih jauh dari yang diharapkan oleh buruh sebenarnya. Tetapi mereka relatif lebih beruntung.

Adapun jenis buruh harian lepas kondisinya berada di bawah jenis buruh yang pertama. Gajinya lebih rendah, tidak mendapat fasilitas tempat tinggal, tidak mendapat catu beras, dan tidak disediakan fasilitas kesehatan bagi mereka. Sesuai dengan sebutannya buruh harian lepas, mereka adalah kelompok buruh tidak tetap di perusahaan.

Biasanya kelompok buruh jenis ini berasal dari desa-desa atau tempat yang berada di sekitar wilayah perkebunan berada. Mereka juga sering harus menunggu waktu kapan mereka dibutuhkan oleh perusahaan untuk bekerja. Karena itu aktifitas, jenis pekerjaan dan volume bekerja mereka sangat tergantung pada kebutuhan dan keperluan pihak perusahaan. Bisa saja sewaktu-waktu mereka menganggur karena belum ada pekerjaan yang harus mereka kerjakan di perkebunan. Meskipun tidak terlalu banyak, tetapi jumlah buruh jenis kedua ini juga jumlahnya tidak sedikit di perusahaan.

Pada dasarnya buruh anemer sama dengan buruh harian lepas. Tetapi dari ketiga jenis buruh yang disebutkan di atas kondisi buruh anemer berada paling bawah. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama peneliti di lapangan ditemukan bahwa istilah anemer ini menurut mereka berasal dari bahasa Belanda. Dalam konteks ini memiliki makna sebagai buruh kontrak yang tidak tetap.

Manajemen perkebunan pada saat ini perusahaan perkebunan menggunakan istilah anemer ditujukan kepada buruh yang mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin

dikerjakan oleh buruh tetap. Misalnya, membangun fasilitas perumahan buruh, fasilitas jalan atau transportasi di perusahaan, membuat lapangan tenis untuk para petunggi di perusahaan, lapangan sepak bola dan sebagainya.

Tetapi tidak menutup kemungkinan buruh anemer juga mengerjakan pekerjaan yang sama dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh kedua jenis buruh di atas. Buruh anemer biasanya bekerja melalui broker atau pemborong. Sehingga nasib mereka di perkebunan sangat ditentukan oleh si pemborong. Pihak perkebunan hanya berurusan langsung dengan pemborong dan pemboronglah yang berurusan kemudian dengan buruh anemer. Perusahaan tidak mau tahu dengan keadaan mereka karena perusahaan hanya terikat kontrak dengan pemborong.

Tidak jarang karena buruh anemer merupakan buruh kontrak bisa saja mereka di datangkan dari tempat atau daerah yang jauh dari wilayah tempat perusahaan berada. Mereka membangun tempat tinggal sementara yang sangat sederhana bahkan jauh dari standar hidup yang layak. Istri dan anak-anak mereka juga kerap ikut bersama menempati tempat sementara itu.

Baik buruh harian lepas maupun buruh anemer, mereka sangat berharap bisa diangkat oleh perusahaan menjadi buruh tetap di perusahaan. Tetapi biasanya sangat sulit. Ada tes kesehatan badan yang sering mereka sebut "*kiur*", ada "*tes screening*" atau bersih lingkungan dan sebagainya. Mereka harus lulus dari berbagai tes dan masa percobaan atau bisa jadi lulus dari penelitian khusus (*litsus*) yang dilakukan oleh pihak perusahaan.

Penelitian khusus ini dilakukan untuk memastikan apakah si buruh tidak terlibat pada gerakan-gerakan yang dianggap merugikan perusahaan atau mengancam keberadaan perusahaan. Semisal demonstrasi, protes-protes, mogok kerja dan sebagainya yang dianggap sebagai sikap perlawanan dan tidak loyal pada perusahaan. Selain itu, buruh juga diteliti apakah terlibat dalam gerakan-gerakan lain yang dianggap berbahaya, seperti G 30 S/PKI. Jika terlibat dalam gerakan-gerakan demikian maka dipastikan buruh sangat sulit untuk diterima.

Mereka harus mendaftar terlebih dahulu melalui mandor, kerani, atau orang perusahaan yang mereka kenal. Mendaftar menjadi calon buruh tetap bisa dilakukan dengan syarat bahwa mereka harus sudah melalui masa menjadi buruh harian lepas minimal selama tiga bulan. Walaupun demikian belum tentu diterima secara otomatis. Jika semua persyaratan tersebut mampu dilewati, barulah bisa menandatangani surat perjanjian kerja yang disediakan perusahaan.

Sebab berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang informan buruh harian lepas banyak di antara mereka meskipun sudah bekerja sebagai buruh harian lepas lebih dari dua tahun belum juga diangkat menjadi buruh tetap. Ada temuan menarik bahwa di antara mereka tidak sedikit yang harus memberi "*amplop*", "*uang pelicin*" supaya bisa menjadi buruh tetap.

Secara umum dari gambaran di atas dapat dipahami bahwa kondisi kehidupan buruh selama ini hingga sekarang belum mengalami perubahan yang berarti. Meskipun pada tataran teoritis dan pengamatan sepintas buruh di perkebunan saat ini lebih sejahtera dan lebih diperlakukan manusiawi oleh pihak perusahaan perkebunan.

Namun jika ditelusuri lebih jauh dan mendalam, realita kehidupan buruh perkebunan masih jauh dari yang diharapkan oleh buruh sebenarnya. Tetapi mereka lebih cenderung menerima apa adanya saja. Menunggu perubahan nasib sepenuhnya dari pihak perusahaan. Termasuk pada konteks ini kondisi kehidupan buruh perempuan yang relatif terabaikan.

2.5 Pola Penggunaan Tenaga Kerja di Perkebunan

Buruh perkebunan terikat perjanjian kerja dengan perusahaan. Perjanjian tersebut dinamakan Kesepakatan Kerja Bersama atau disingkat dengan KKB. Di dalam KKB tersebut diatur tentang tugas, kewajiban dan tanggung jawab kedua belah pihak. Namun pada kenyataannya perjanjian tersebut lebih menguntungkan pihak perusahaan. Sebab biasanya KKB tersebut ditetapkan sepihak oleh perusahaan tanpa melibatkan pihak buruh, hal itu karena posisi tawar perusahaan lebih kuat.

Selain itu, berdasarkan pengalaman buruh yang diwawancarai selama proses penelitian ini dilakukan ditemukan bahwa KKB ini pun jarang atau bahkan lazimnya tidak pernah disosialisasikan kepada mereka. Sehingga umumnya mereka kurang mengetahui apa hak-hak mereka. Mereka bekerja cenderung berdasarkan atas rutinitas apa yang telah dilakukan oleh buruh yang telah bekerja selama ini, bekerja di pabrik dan di lokasi tanaman perkebunan (Lampiran foto. 4).

Penggunaan tenaga kerja dan waktu kerja di perkebunan secara garis besar dialokasikan untuk pembibitan, penanaman, pemeliharaan, panen, perawatan dan pengelolaan pabrik. Mulai dari merawat hingga memanen hasil perkebunan

merupakan pekerjaan umum buruh, termasuk pekerjaan buruh perempuan. Berikut jenis pekerjaan yang dikerjakan buruh di perusahaan berdasarkan pola penggunaan tenaga kerja menurut informasi Sudarno (40 tahun) sebagai aktivis buruh:

Tabel 6
Jenis Pekerjaan dan Pola Penggunaan Tenaga Kerja

| No | Jenis Pekerjaan | Buruh |
|----|----------------------|-------------------------|
| 1 | Transportasi | Laki-Laki |
| 2 | Bengkel/Reperasi | Laki-Laki |
| 3 | Memanen Buah | Laki-Laki dan Perempuan |
| 4 | Harian dan Perawatan | Laki-Laki dan Perempuan |
| 5 | Kearifan | Laki-Laki |

Sumber: Hasil Wawancara

Penggunaan tenaga kerja buruh yang terbesar ada pada perawatan dan memanen hasil. Bisa dikatakan bahwa volume dan waktu bekerja terbesar ada pada dua jenis pekerjaan tersebut. Dua jenis pekerjaan tersebut dilakukan secara rutin setiap harinya dan tenaga kerja buruh perempuan paling banyak dibutuhkan di dalamnya, terutama untuk jenis pekerjaan rawatan tanaman. Pekerjaan merawat tanaman ini juga relatif lebih rumit. Sedangkan pekerjaan memanen relatif lebih sederhana dan biasanya dikerjakan kaum lelaki. Meskipun buruh perempuan juga melakukan pekerjaan memanen (Lampiran foto. 6).

Berdasarkan pola pembagian dalam penggunaan tenaga kerja antara buruh laki-laki dengan buruh perempuan di atas, dipahami bahwa untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik, seperti memanen buah sawit cenderung menggunakan tenaga buruh laki-laki. Sedangkan untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan ketekunan dan ketelitian serta kehati-hatian, seperti memupuk dan

memanen coklat dikerjakan bagi buruh perempuan. Demikian pola pembagian tenaga kerja di perkebunan.

Dari pola pembagian dan penggunaan tenaga kerja di perkebunan tersebut dipahami bahwa ada kecenderungan pola penggunaan tenaga kerja dan pembagian jenis pekerjaan ditetapkan berdasarkan stereotipe gender. Pembagian kerja berdasarkan stereotipe gender ini kemudian berpengaruh pula pada penghargaan dan penilaian hasil kerja dan salah satunya berpengaruh pada pemberian upah. Setiap jenis pekerjaan buruh perempuan selalu dianggap sebagai jenis pekerjaan nomor dua, dihargai lebih rendah dalam pemberian upah. Sebab jenis pekerjaan itu dinilai lebih ringan dan sedikit resikonya. Hal ini dikaitkan pula dengan menempatkan status buruh perempuan sebagai buruh harian lepas.

Ada beberapa jenis tanaman dominan yang ditanam pada areal perkebunan di Serdang Bedagai yaitu: kelapa sawit, coklat dan karet (Lampiran foto. 2 dan 3), dengan catatan tanaman kelapa sawit dan coklat yang terbesar. Umumnya penggunaan tenaga buruh terkonsentrasi lebih banyak di areal perkebunan ini, ketimbang di pabrik dan perkantoran, mulai dari merawat tanaman hingga memanen hasilnya.

Jenis pekerjaan merawat tanaman di antaranya adalah: (1) membabat rumput gawangan atau piringan pohon coklat, sawit dan karet (2) menyebar pupuk, (3) meracun rumput, (4) membersihkan pelepah sawit. Sedangkan jenis pekerjaan memanen atau mengambil hasil adalah: (1) menderes batang karet, (2) mendodos atau "ngegrek" buah kelapa sawit, (3) memetik coklat. Sedangkan jenis lainnya seperti

menyebarkan janjangan buah kelapa sawit kosong ke sekitar piringan pohon kelapa sawit, menunas ranting coklat, membersihkan batang kelapa sawit, membuang dan menyusun pelepah kelapa sawit dan sebagainya (Lampiran foto 6, 7 dan 8).

Khusus bagi buruh perempuan seperti telah disebutkan sebelumnya, biasanya pekerjaan yang mereka lakukan terkait dengan jenis pekerjaan yang memerlukan ketekunan dan ketelitian. Di antara jenis pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh buruh perempuan adalah: membabat rumput gawangan atau piringan coklat, kelapa sawit dan karet, menyebar pupuk, meracun rumput, memungut *brondolan* sawit, dan memetik coklat.

Biasanya jenis pekerjaan dilakukan dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan perkebunan jadwalnya yaitu berdasarkan jam kerja. Buruh bekerja selama rentang waktu jam bekerja tersebut. Misalnya dari jam 08.00 pagi sampai jam 12.00 siang dengan gaji 8.000 rupiah. Kewajiban buruh hanya bekerja selama waktu itu tanpa ada target hasil bekerja karena gaji yang diperoleh sudah pasti. Saat ini ada perubahan ketentuan jam kerja dirubah kepada besarnya hasil atau borongan yang dapat diselesaikan. Karena menurut pihak perkebunan ketentuan bekerja berdasarkan jam bekerja tidak efektifitas dan efisien. Sebab buruh dianggap hanya memfokuskan diri pada pemenuhan jam bekerja semata.

Jenis pekerjaan merawat tanaman hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tanaman. Jika rumput tinggi dan tanaman pengganggu atau banyak pelepah kelapa sawit yang sudah tua, maka harus segera dibabat, dibersihkan atau disemprot. Memanen sawit dilakukan dua sampai tiga kali dalam sebulan secara rutin.

Bagi buruh yang bekerja di areal tanaman karet, menderes pohon karet harus setiap hari, sekaligus mengumpulkan hasil getah yang diperoleh hari itu. Pekerjaan-pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan rutin buruh sampai masa pensiun atau tidak bekerja lagi di perkebunan.

Hampir tidak ada waktu libur bekerja bagi buruh. Kecuali beberapa hari saja pada masa perayaan hari raya besar keagamaan. Jam istirahat buruh juga sangat singkat. Biasanya ketika bekerja mereka harus membawa persiapan makanan untuk dimakan di areal bekerja ketika waktu istirahat atau disebut dengan istilah *wolon*.

Berdasarkan pengamatan di lapangan resiko pekerjaan bekerja di perkebunan juga sangat rawan. Hampir tidak ada pekerjaan yang dilakukan tanpa ada resikonya. Hal ini terungkap dari wawancara yang dilakukan dengan Yatno (32 tahun) yang bekerja sebagai tukang panen kelapa sawit sebagai berikut:

Kalau mendodos sawit, paling sering ya kena duri sawit lah. Berdarah dan kalau tidak hati-hati malamnya bisa mendenyut bekas kena duri itu. Lama-lama kebal juga jadinya. Ada juga yang kena *gancu, dodos, egrek*. Yang paling parah, kalau ketimpa janjangan sawit atau pelepah. Bisa luka parah atau malah tidak sedikit yang meninggal dunia ketimpa buah.

Begitu juga jenis pekerjaan yang dilakukan oleh buruh perempuan. Kondisi dan lokasi bekerja sangat rawan bagi diri mereka. Di antara jenis pekerjaan yang kerap dilakukan oleh buruh perempuan adalah: membabat dan meracun rumput atau istilah yang kerap digunakan *nyemprot*. Ketika membabat rawan terjadi kecelakaan, misalnya luka terkena alat babat, digigit ular ataupun serangga seperti tawon, lipan dan terkena duri kelapa sawit. Jika terkena duri sawit bisa terserang demam karena bekas luka akan infeksi dan mendenyut.

Pengalaman beberapa orang buruh perempuan menyatakan bahwa kesehatan dan keselamatan mereka tidak terjamin saat bekerja. Misalnya saat meracun rumput mereka biasanya tidak dilengkapi dengan alat pengaman masker penutup hidung dan mulut. Karena perusahaan tidak menyediakan alat pengaman tersebut untuk buruh. Padahal fasilitas tersebut merupakan kewajiban pihak perusahaan perkebunan untuk menyediakannya.

Padahal kondisi dan situasi yang bekerja menyempit sangat rawan bagi kesehatan buruh. Cairan yang disemprotkan tersebut adalah racun rumput yang mengandung zat kimia dan berbahaya bagi tubuh. Sehingga tidak jarang di antara mereka merasa pusing kepala, mata perih, gatal-gatal, mual dan muntah-muntah sehabis mengerjakan pekerjaan tersebut. Namun mereka tetap bertahan dengan kondisi bekerja yang demikian. Sementara perusahaan kelihatannya kurang memperhatikan kondisi bekerja buruh.

Kondisi bekerja yang demikian dari tahun ke tahun mereka alami di perkebunan. Belum ada perubahan yang berarti pada kondisi pekerjaan dan kehidupan buruh perempuan di perkebunan. Walaupun ada perubahan tetapi perubahan tersebut cenderung belum menyentuh pada hal-hal mendasar terhadap perbaikan kehidupan buruh perempuan.